

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yang disebut juga KPP Pratama Pati merupakan unit pelaksana atau unit vertikal yang menyelenggarakan segala pelayanan perpajakan kepada masyarakat di wilayah kerja Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Fiskus mulai dari pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi (PTP) maupun Wajib Pajak Badan. Setelah menjadi PNB, tidak ada kesulitan dalam melakukan penagihan pajak karena adanya serangkaian kewajiban jangka panjang bagi orang pribadi atau badan hukum yang memiliki PNB, mulai dari ketetapan pajak, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan tahunan PDB. Jelasnya, permasalahan perpajakan ini menimbulkan ketidakpatuhan Wajib Pajak, antara lain keengganan Wajib Pajak untuk menghitung kewajiban perpajakannya berdasarkan kasus per kasus, keengganan Wajib Pajak untuk mengunjungi atau berkonsultasi dengan pejabat terkait dan memberitahukan kesulitannya dalam mempersiapkan PDB. .

Stigma negatif terkait online dan DJP (Dinas Pendapatan dan Bea Cukai). Salah satu landasan untuk menjaga penerimaan tetap tepat sasaran adalah kepatuhan terhadap persyaratan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak patuh maka diharapkan ia mampu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan terkait (Widowati 2015). Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak bukanlah hal yang mudah. Meski tampaknya belum

berfungsi maksimal, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya.

Wajib Pajak harus mematuhi KPP Pratama Pati secara terus menerus dan konsisten. Meskipun terdapat Wajib Pajak yang benar-benar mematuhi peraturan perpajakan, namun masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh, yaitu tidak memenuhi atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan seorang Wajib Pajak antara lain tercermin pada tingkat pelaporan SPT tahunannya. Berikut cara Wajib Pajak orang pribadi dan badan dapat menerima SPT tahunan dari KPP Pratama Pati: Tabel 0.1 Realisasi Penerimaan SPT Tahunan KPP Pratama Pati

Tahun Pajak	SPT Tahunan PPh Badan	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Grand Total	Target	Capaian (%)
2020	4.146	55.743	59.889	74.889	80,78
2021	3.913	62.525	66.438	64.603	102,84
2022	4.276	60.180	64.456	70.663	91,22
Grand Total	12.485	180.038	192.523		

Sumber: Laporan Capaian Penerimaan SPT Tahunan KPP Pratama Pati, 2023.

Tabel 0.2 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Pati 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Ratio Penerimaan
2018	784.592.558.000	629.725.362.619	80,26%
2019	841.745.809.000	783.881.490.447	93,13%

2020	697.996.480.000	777.403.505.829	111,38%
2021	742.097.965.000	591.357.039.903	79,69%
2022	575.590.161.000	647.239.943.928	112,45%

Sumber: Laporan Realisasi KPP Pratama Pati, 2023.

Permasalahan kepatuhan Wajib Pajak juga didukung oleh data realisasi pendapatan KPP Pratama Pati tahun 2018-2022 seperti terlihat pada Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pendapatan KPP Pratama Pati selama tahun 2018-2022 hanya mencapai target tahun 2020 dan 2022 yaitu sebesar 111,38% dan 112,45%. Pada tahun 2018, 2019 dan 2021, implementasi pendapatan KPP Pratama Pati masih kurang optimal. Hal ini karena hasil fiskal tidak jauh berbeda dengan rencana fiskal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pelayanan Pajak Pratama Pati dapat memverifikasi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kantor itu kurang optimal. .

Kantor Pajak Pratama (KPP) merupakan lembaga yang menangani secara mendalam kasus tunggakan pajak warga negara. Gagal bayar Wajib Pajak berdampak langsung pada rendahnya penerimaan pajak negara dan mengurangi keuangan negara. Berikut data capaian pendapatan tahun 2023 dan target APBN.

Tabel 0.3 Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	Target 2023 (Rp Triliun)	Realisasi s.d. 31 Januari 2023		
		Rp Triliun	Δ% '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935,07	86,32	23,15	9,23

-Non Migas	873,63	78,29	28,03	8,96
-Migas	61,44	8,03	-10,19	13,07
PPN & PPnBM	742,95	74,63	93,86	10,04
PPB	31,31	0,41	508,61	1,31
Pajak Lainnya	8,70	0,88	68,27	10,07
Jumlah	1.718,03	162,23	48,60	9,44

Sumber: APBN Kinerja & Fakta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa pencapaian target penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 935,7 triliun pada tanggal 31 Januari 2023 dapat dicapai sebesar Rp 86,32 triliun dengan tingkat implementasi sebesar 9,23%. Masih terdapat kesenjangan sebesar 90,77% terhadap target tahun 2023, yang menunjukkan bahwa penerimaan masih belum optimal seiring dengan masih adanya permasalahan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah bersama DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna Republik Korea Indonesia untuk membahas/menyelesaikan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU) tingkat kedua. (APBN) TA 2023. Pemerintah dan anggota parlemen harus memastikan bahwa APBN pada tahun anggaran 2023 tetap menjadi alat yang dapat diandalkan untuk membatasi berbagai guncangan yang dihadapi negara, melindungi masyarakat, dan mencapai momentum pemulihan. Terus berlanjut. Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, pemerintah akan menerapkan berbagai langkah untuk memerangi dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, 2021, dan 2022 melalui layanan kesehatan, kebijakan pasokan vaksin, pengaturan dukungan sosial, dan dukungan insentif

bagi individu yang terkena dampak. Tetapkan langkah dan strategi. Masyarakat mengakui Indonesia sebagai negara yang mampu menyerap dampak pandemi Covid-19 dengan baik.

Mengingat pentingnya pendapatan bagi pemerintah, penelitian kepatuhan pajak sangatlah penting. Menentukan cara meningkatkan pendapatan pemerintah dengan meningkatkan kepatuhan pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Fishbone, yang mencakup seluruh faktor untuk menganalisis permasalahan secara jelas.

Hal ini akan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Pati. Diagram tulang ikan membentuk titik-titik yang mengarah pada penyebab permasalahan. Diagram tulang ikan membantu peneliti melihat suatu masalah secara holistik dan menentukan penyebabnya sehingga masalah tersebut dapat terlihat jelas dan masalah-masalah kecil dapat diidentifikasi dan berkontribusi terhadap masalah yang lebih besar. Pengetahuan yang mendalam terhadap masalah memudahkan penyidik mengambil langkah untuk menentukan penyebab masalah.

## **1.2 Ruang Lingkup**

- a. Obyek penelitian pada Kantor Pajak Pratama Pati.
- b. Wajib Pajak wajib SPT di lingkungan KPP Pratama Pati yang terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang dengan jumlah 86.629 Wajib Pajak.
- c. Informan, terdiri dari komponen yaitu petugas pajak KPP Pratama Pati, Wajib Pajak dan Konsultan Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pati.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Fenomena lapangan yang akan penulis teliti adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditinjau dari perspektif pelayanan, sistem perpajakan modern, kepuasan kerja, dan pengetahuan pajak menggunakan analisis *fishbone*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sebab-sebab yang timbul dan akibatnya pada setiap perspektif yaitu perspektif pelayanan, administrasi modern perpajakan, pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dan Kompetensi Petugas Pajak pada Wajib Pajak KPP Pratama Pati?
- b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pati?
- c. Bagaimana peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari perspektif pelayanan, Administrasi modern perpajakan, pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dan kompetensi petugas pajak KPP Pratama Pati?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisa sebab-sebab yang timbul dan akibatnya pada setiap perspektif yaitu perspektif pelayanan, Administrasi modern perpajakan, pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dan kompetensi Petugas Pajak pada Wajib Pajak KPP Pratama Pati
- b. Menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pati

- c. Menganalisa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari perspektif pelayanan, teknologi digital perpajakan, pengetahuan pajak Wajib Pajak dan kompetensi petugas pajak KPP Pratama Pati

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teori maupun praktis, yaitu:

- a. Memberikan masukan bagi pelaku kebijakan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari sisi perspektif pelayanan, sistem perpajakan modern, dan pengetahuan pajak.
- b. Memberikan informasi strategis berbasis hasil penelitian tentang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari sisi perspektif pelayanan, sistem perpajakan modern, dan pengetahuan paja